DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

RENSTRA 2025-2029



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai bentuk penjabaran dan langkah strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sambas 2025-2029 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas demi mempercepat **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang "BERKAH BERKEMAJUAN"**.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sambas yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas ini, Semoga Dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Sambas, September 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas

PURTIKO ELDIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19681006 199503 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.3.1. Maksud 6
1.3.2. Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9
1.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 9
1.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 20
1.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23
1.1.4. Kelompok Sasaran Layanan 29
1.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 33
1.2. Permasalahan dan Isu Strategis 34
1.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 34
1.2.2. Isu Strategis 35
1.2.3. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD 35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 38
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 39
3.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah 44
4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas 98
4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD 99
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 102

BAB V PENUTUP 106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 21

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Sambas Tahun 2025 22

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025 23

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2022-2025.... 24

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Sambas Tahun 2022-2025 28

Tabel 2.6 Rasio Anggaran dan Realisasi serta Rata-rata Pertumbuhan..... 29

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas 36

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 41

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas 42

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 43

Tabel 4.1 Program Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 45

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 49

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 69

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 99

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sambas 101

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Sambas 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 11

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 38

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas..... 40

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

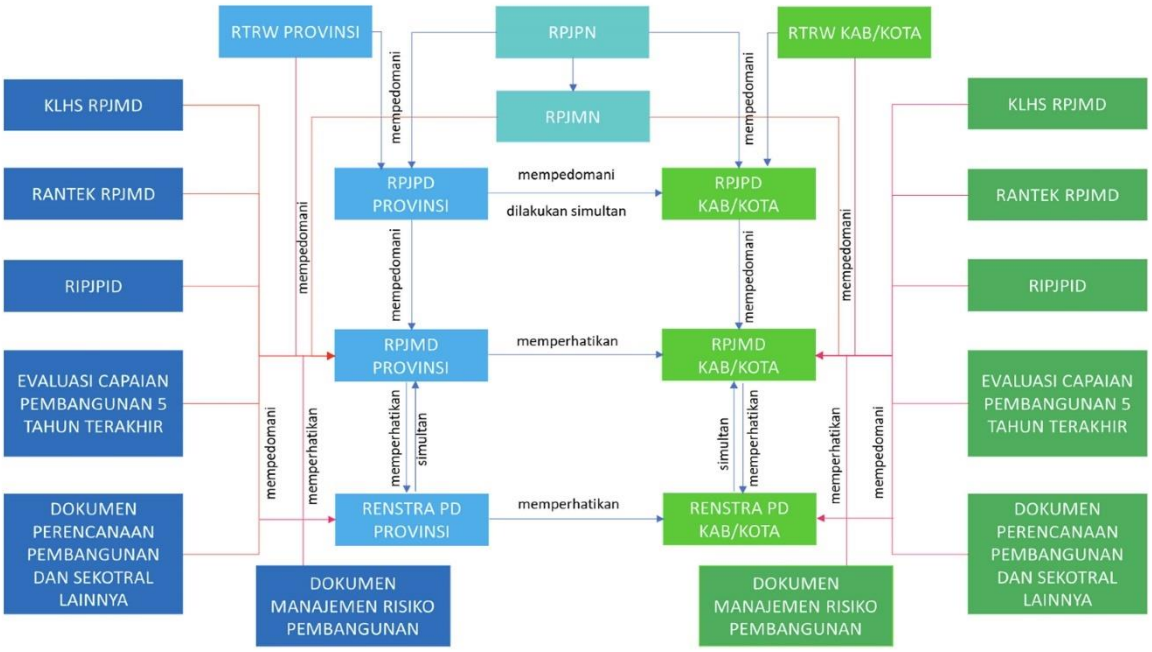
Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat (1), maka Dinas Sosial Kabupaten Sambas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sambas yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Sambas.

Mengingat perencanaan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasi. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping Renstra DINSOS Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sambas menjadi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas 8 Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sambas lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratik melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik.



Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2019 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 2).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas adalah untuk memberikan arah dan panduan yang jelas dalam mencapai tujuan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sambas guna mendukung pelaksanaan dan

pencapaian mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan kerangka dasar dalam operasionalisasi rencana kegiatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengelola sumber daya organisasi secara efektif;
2. Memastikan organisasi dapat mencapai visi dan misinya secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
3. Menyediakan tolok ukur untuk memantau kemajuan dan memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan dan mitra Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam pemberian pelayanan. Selain itu, bab ini juga berisi tentang permasalahan dan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sambas, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan sosial. Urusan yang dilaksanakan antara lain meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini mencakup penanganan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak, lanjut usia, disabilitas, dan fakir miskin, serta kegiatan lain seperti penanggulangan bencana, penyelenggaraan Hari Pahlawan, dan pengelolaan hibah bantuan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

1.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Sosial, Penanganan Bencana dan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

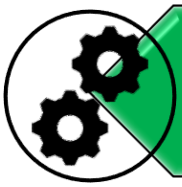
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sambas menyelenggarakan fungsi:



Perumusan program kerja di bidang sosial



Perumusan kebijakan di bidang di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial



Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial



Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial



Pengorganisasian dan pembinaan teknis di bidang di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial



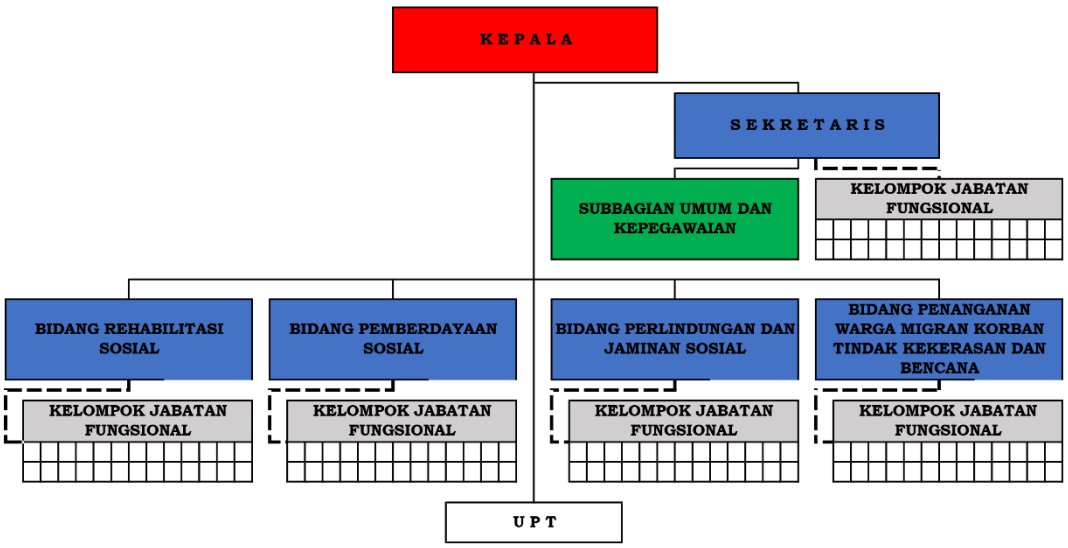
Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan dinas



Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Dinas Sosial Kabupaten Sambas dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas
b) Sekretariat, terdiri dari:
   (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Bidang Rehabilitasi Sosial
d) Bidang Pemberdayaan Sosial
e) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
f) Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana
g) Unit Pelaksana Teknis Dinas
h) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas

Uraian tugas dan fungsi kelengkapan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,

mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. peningkatan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS);
b. penetapan program kerja dibidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
c. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan bencana dan warga migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial; dan
k. pelaksanaan fungsi dan tugas pembantuan di bidang sosial yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kelompok Bidang

a) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Rehabilitasi Sosial;
c. pelaksanaan Penyediaan Permakanan, Sandang, Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
d. pelaksanaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
e. pelaksanaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
f. fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

g. pemberian Akses ke Layanan Pendidikan, Kesehatan Dasar, Data, Pengaduan, Penelusuran Keluarga, Reunifikasi Keluarga, Layanan Rujukan dan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAIZA di Luar Panti Sosial;
h. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
i. fasilitasi pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi sosial;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

b) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten, pengembalian potensi sumber kesejahteraan daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan sosial;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil, pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten, pengembangan potensi sumber kesejahteraan daerah, pemeliharaan taman makam pahlawan;
d. fasilitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
e. peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil;
f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
g. peningkatan kemampuan potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
h. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
i. pemberian stimulan bantuan usaha dan pelatihan kewirausahaan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
j. fasilitasi pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA);
k. pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas, berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan sosial;
n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan sosial; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang perlindungan sosial korban bencana alam maupun bencana sosial dan fakir miskin serta jaminan sosial keluarga dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c. pelaksanaan penjangkauan dan rujukan anak-anak terlantar;
d. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
e. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau pemberian akses bantuan hukum;
g. pelaksanaan jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah;
h. pelaksanaan jaminan sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan yang diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas j asa-jasanya;
i. fasilitasi pelaksanaan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
k. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan.

d) Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana

Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Penanganan Korban Bencana dan Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial serta pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan daerah asal serta pemulangan migran ke daerah asal melalui Dinas Sosial Provinsi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dan Bencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana dan migran korban tindak kekerasan;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
d. pelaksanaan penyediaan makanan, sandang, dan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan sosial;
e. penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial;
f. pelayanan dukungan psikososial korban bencana alam dan sosial;
g. koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;

h. fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulang!<an ke desa asal;
i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan;
j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penanganan korban bencana dan migran korban tindak kekerasan.

3) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan program di lingkungan Sekretariat;
b. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, dan reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan dan aset;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pen5msunan program kerja Dinas;
e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, reformasi birokrasi, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-perundangan;

g. g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i. pelaksanaan penyusunan program terhadap tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan serta pembinaan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan dinas;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Sambas belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup kerjanya.

1.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sambas meliputi sumber daya manusia/aparatur yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana yaitu barang/media sebagai penunjang operasional pekerjaan. Jumlah aparatur

DINSOS Kabupaten Sambas per Agustus 2025 sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang Perempuan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Sambas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	1	0	4	0	5
2	D3	0	1	0	1	2
3	S1/D4	4	4	1	2	11
4	S2	1	1	0	0	2
TOTAL		**6**	**6**	**5**	**3**	**20**

Kondisi eksisting kepegawaian tersebut di atas menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, persentase pegawai (baik PNS maupun non PNS) berjenis kelamin Laki-laki sebesar 55% dan Perempuan sebesar 45%. Berdasarkan tabel di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 2 orang atau proporsinya sebesar 10% dari seluruh jumlah pegawai baik PNS maupun non PNS. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 11 orang dengan proporsi 55% dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk klasifikasi D3 berjumlah 2 orang dengan proporsi 10% dari seluruh jumlah pegawai. Klasifikasi SMA/SMK sebanyak 5 orang atau dengan proporsi sebesar 25% dari agregat jumlah pegawai yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sambas menurut golongan, lebih didominasi oleh Golongan III sebanyak 9 orang atau sebesar 75% dari jumlah PNS yang ada Dinas Sosial Kabupaten Sambas, yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Sambas Tahun 2025

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	1	1
2	Golongan III	5	4	9
3	Golongan IV	1	1	2
Jumlah		**6**	**6**	**12**

Dengan melihat SDM yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sambas di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan S1. Dari 12 PNS yang termasuk dalam jabatan manajerial berjumlah 4 pegawai dan 8 pegawai dalam jabatan non manajerial yaitu 4 orang pejabat fungsional dan 4 orang pelaksana. Mengingat beban kinerja yang dihadapi, perlu adanya peningkatan kuantitas maupun peningkatan kualitas (kualifikasi, kompetensi dan kapasitas) aparatur yang dibutuhkan di Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial.

b. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sejalan dengan fungsinya, di samping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang dan mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Ditinjau dari dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas tergolong sangat minim. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Sambas baru saja terbentuk pada tahun 2025.

Dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana di Dinas Sosial
Kabupaten Sambas Tahun 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan dinas roda 4	
2.	Kendaraan dinas roda 2	3
3.	Alat bengkel dan alat ukur	
4.	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	
5.	Alat kantor lainnya	
6.	Alat rumah tangga	4
7.	Alat pendingin	3
8.	Alat rumah tangga lainnya	
9.	Alat pemadam	
10.	Meja kerja pejabat	12
11.	Kursi kerja pejabat	5
12.	Kursi hadap depan meja	
13.	Lemari arsip	2
14.	Peralatan studio	
15.	Alat komunikasi *telephone*	
16.	Personal komputer	15
17.	Peralatan personal komputer	13
18.	Bangunan gedung kantor	1
19.	Bangunan gedung pertemuan	
20.	Jalan dan jembatan	
21.	Jaringan	
JUMLAH		**58**

1.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dengan demikian, Dinas Sosial mempunyai kewajiban dalam melaksanakan kinerja di bidang sosial. Realisasi kinerja dari pelayanan tersebut antara lain terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan sosial.

Pada periode Renstra sebelumnya, urusan sosial masih dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Sambas, dimana telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan di bidang sosial, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Satu-an	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Renstra			Persentase Capaian			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025 *)
1	Tingkat Perlindungan Sosial	%			80	83,75	87,50	78,83	87,26	87,03	98,54	104,19	99,46	
2	Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil	%			20	30	40	45,24	45,02	57,32	226,2	150,07	143,30	
3	Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%			100	100	100	100	100	100	100,	100	100	

No	Indikator Kinerja	Satu-an	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Renstra			Persentase Capaian			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025 *)
	dasarnya di luar panti													
5	Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	%			60	70	80	76,83	87,26	87,03	128,05	124,66	108,79	
6	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%			60	70	80	66,67	66,67	66,67	111,12	95,24	83,34	
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%			60	70	80	59,32	68,06	77,27	98,87	97,23	96,59	

No	Indikator Kinerja	Satu-an	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra			Realisasi Renstra			Persentase Capaian			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025 *)
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%			100	100	100	100	95	100	100	95	100	
9	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

**) 2025 : Angka Proyeksi*

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja urusan sosial dari kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 sudah cukup baik, karena rasio capaian kinerja hampir sebagian besar indikator mencapai 100 persen bahkan ada yang melampaui target. Capaian terendah pada indikator Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 83,34%. Hal ini terutama disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga kegiatan pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat ditunda pelaksanaannya.

Secara rinci anggaran dan realisasi anggaran pelayanan urusan sosial di Kabupaten Sambas selama kurun waktu tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Sambas Tahun 2022-2025

No	Program	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 *)
1	Program Pemberdayaan Sosial	39.999	255.096	466.755	187.428	39.678	254.494	449.347	184.533
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	130.564	19.903	47.131	11.641	129.647	19.766	47.081	11.593
3	Program Rehabilitasi Sosial	335.603	537.483	580.971	203.235	329.808	534.035	572.018	201.038
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	262.333	788.977	742.309	340.484	259.135	785.422	624.142	339.571
5	Program Penanganan Bencana	128.785	175.756	444.117	122.088	122.466	174.066	443.785	121.917
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	77.959	265.142	101.045	49.975	77.875	264.809	97.269	49.963

**) 2025 : Angka Proyeksi*

Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Rasio Anggaran dan Realisasi serta Rata-rata Pertumbuhan

No.	Program	Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke				Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	Anggaran (Rp.000)	Realisasi
1	Program Sosial	99,20	99,76	96,27	98,46	237.319	98,42%
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	99,30	99,31	99,90	99,59	52.310	99,52%
3	Program Rehabilitasi Sosial	98,27	99,36	98,46	98,92	414.323	99,23%
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	98,78	99,55	84,04	99,73	533.526	98,88%
5	Program Penanganan Bencana	95,09	99,04	99,93	99,86	217.686	98,48%
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	99,89	98,07	96,26	99,98	123.530	98,55%

1.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan adalah kelompok individu, organisasi, atau entitas lain yang menjadi fokus atau target dari suatu program, layanan, atau intervensi tertentu. Mereka adalah orang-orang yang diharapkan mendapatkan manfaat dari pelayanan yang diberikan.

Secara umum, Dinas Sosial melayani seluruh lapisan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Saat ini tercatat ada 26 jenis PPKS dengan sebagai berikut:

1. **Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu;
2. **Anak Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
3. **Anak berhadapan dengan hukum** adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana;
4. **Anak Jalanan** adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari;
5. **Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental;
6. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS;
7. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial;

8. **Penyandang Disabil**itas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental;
9. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa;
10. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum;
11. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
12. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaur ulang barang-barang bekas;
13. **Kelompok Minoritas** adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian;
14. **Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)** adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal;
15. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal;
16. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA;
17. **Korban *Trafficking*** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, **fisik**, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan

tindak pidana perdagangan orang. (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang);

18. **Korban Tindak Kekerasan** adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu;
19. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial;
20. **Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
21. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
22. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
23. **Fakir Miskin** adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan;
24. **Keluarga bermasalah sosial psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

25. **Keluarga Berumah Tidak Layak Huni** adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial;
26. **Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

1.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sambas bermitra dengan:

1. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)**, yaitu seseorang yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial daerah untuk membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, termasuk rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat;
2. **Pendamping PKH** adalah tenaga profesional di garda terdepan program bantuan sosial pemerintah yang bertugas mendampingi, memotivasi, dan melatih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kemandirian;
3. **Taruna Siaga Bencana (TAGANA)**, yaitu relawan sosial yang berfokus pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat, baik sebelum, saat, maupun sesudah kejadian;
4. **Pelopor Perdamaian (PORDAM)** adalah relawan sosial masyarakat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial untuk mencegah dan menangani konflik sosial di masyarakat, seperti konflik antarsuku, perebutan wilayah, dan kesenjangan sosial; dan
5. **Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)**, yaitu tenaga kontrak yang bekerja di bawah Kementerian Sosial RI, ditempatkan di Dinas Sosial kabupaten/kota, untuk melaksanakan pendampingan dalam program kesejahteraan sosial anak (PKSA), pendampingan lembaga, penanganan kasus anak, dan tugas khusus lainnya.

1.2. Permasalahan dan Isu Strategis

1.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pada Renstra Dinas Sosial ini dimulai dengan mengacu pada rumusan permasalahan yang dimuat dalam Bab II, RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Sosial, serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (*realita*) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara *realita*/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan disajikan secara ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang telah disajikan pada bab-sebelumnya

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2024, Kabupaten Sambas memiliki angka kemiskinan (6,53%) yang masih lebih tinggi dibandingkan Kubu Raya (4,08%), Mempawah (4,83%), Sanggau (4,67%), dan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (6,32%). Selain itu, target SDG's yang untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk menandakan masalah ini perlu ditangani. Bila dibandingkan dengan target nasional yang tercantum dalam RPJMN dengan target capaian angka kemiskinan berada dalam rentang 7,0-8,0% pada 2025 dan 4,5-5,0% pada 2029, persentase kemiskinan di Kabupaten Sambas pada 2024 masih cukup tinggi.
2. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sambas (0,85) masih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya seperti Kubu Raya (0,36), Sanggau (0,45), dan Kota Singkawang (0,47) pada tahun 2024.
3. Belum optimalnya pelayanan terhadap PPKS, sehingga masih terdapat kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal.
4. Ketiadaan *shelter* atau rumah singgah, menyebabkan kesulitan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT).
5. Minimnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, menyebabkan mereka masih menghadapi risiko sosial yang tinggi.

1.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Sosial Kabupaten Sambas baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain :

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial;
3. Sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial; dan
4. Perlindungan Kelompok Rentan.

1.2.3. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD

Potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Sambas antara lain :

1. Adanya komitmen tinggi dari daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan melalui berbagai strategi dan didukung oleh tersedianya regulasi yang memadai terkait pengentasan kemiskinan.
2. Keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama dalam membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan.
3. Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas, serta potensi sumber daya manusia berupa masyarakat lokal yang bisa diberdayakan untuk turut serta dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

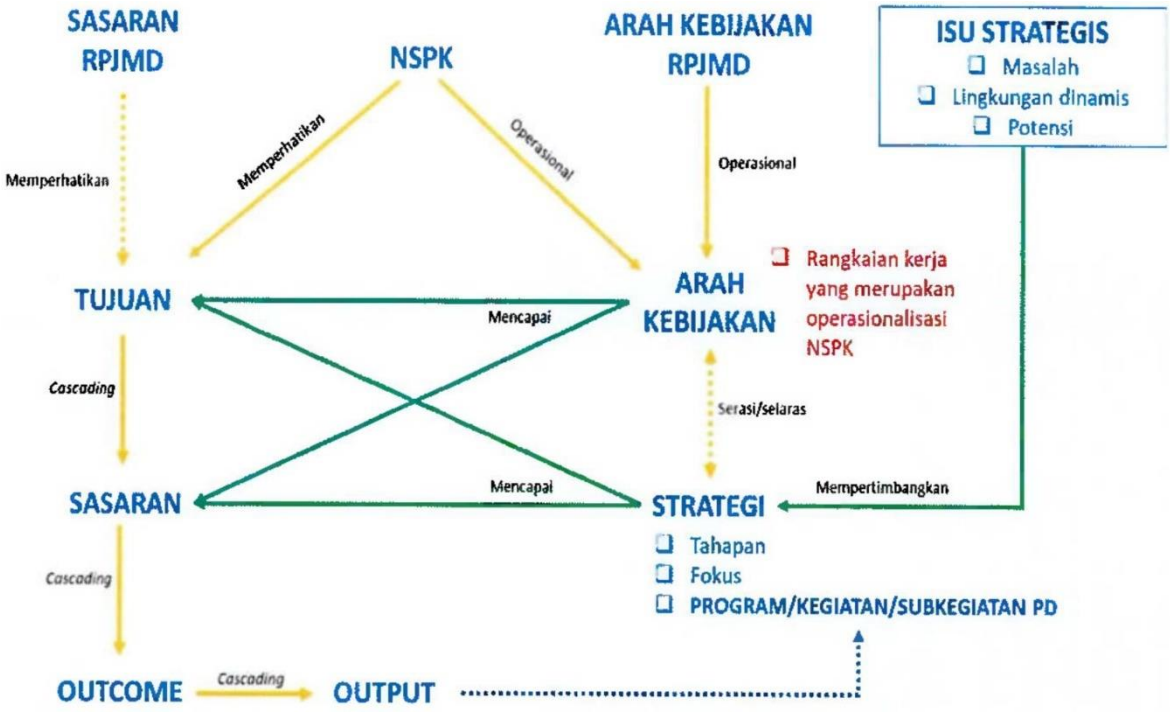
Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial
Kabupaten Sambas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya komitmen tinggi dari daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan melalui berbagai strategi dan didukung oleh tersedianya regulasi yang memadai terkait pengentasan kemiskinan	Masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.		Tujuan 1 SDG's yaitu Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia	Penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026, serta upaya peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Pengentasan kemiskinan
	Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sambas (0,85) masih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya					
Keberadaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berperan aktif	Belum optimalnya pelayanan terhadap PPKS, sehingga masih terdapat kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama dalam membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan.						
Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas, serta potensi sumber daya manusia berupa masyarakat lokal yang bisa diberdayakan untuk turut serta dalam pelayanan kesejahteraan sosial.	Ketiadaan *shelter* atau rumah singgah, menyebabkan kesulitan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT)					Sarana pelayanan di bidang kesejahteraan sosial
	Minimnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, menyebabkan mereka masih menghadapi risiko sosial yang tinggi		Tujuan 3 SDG's yaitu memastikan semua sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia	Kurangnya perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas		Perlindungan Kelompok Rentan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sambas yang dirumuskan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sambas. Sebagian substansi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan bagian substansi dari RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Konsep Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1
Konsep Renstra PD

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Sambas. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran juga didasarkan pada Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas serta melihat perkembangan kondisi umum sosial di Kabupaten Sambas hingga tahun 2025, maka tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

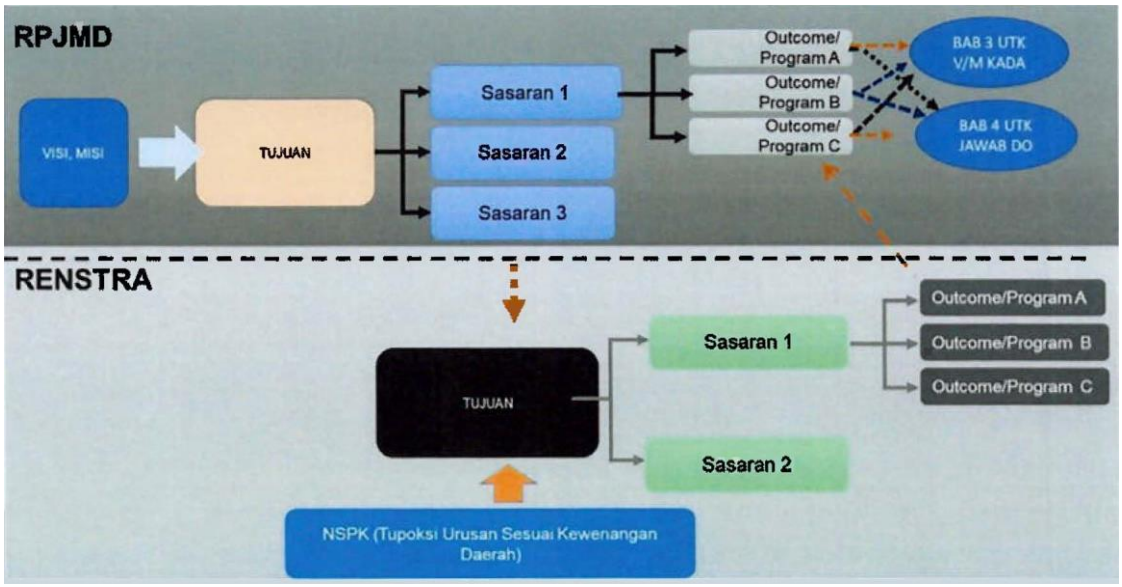
"Meningkatnya Kesejahteraan Sosial menuju Inklusif"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan, ditetapkanlah Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial; dan
2. Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat perlindungan sosial.

Penentuan tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas dilakukan dengan berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas, keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas khususnya Misi 2 yaitu:

- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
- Tujuan 2.1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Sasaran 2.1.11 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial menuju Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	-	56.88	57.38	57.88	58.38	58.88	59.38	
		Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Indeks)	96.10	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat perlindungan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	200	690	1380	2070	2760	3450	4140	

3.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah rencana yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penguatan Modal Dasar Kesejahteraan Sosial	Akselerasi Kesejahteraan Sosial	Perluasan Aktivitas Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Capaian Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Arah kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial	✓ Meningkatkan rehabilitasi sosial	
			✓ Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	
			✓ Meningkatkan layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	
		Meningkatkan pemberdayaan sosial	✓ Meningkatkan pemberdayaan sosial	
			✓ Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	
			✓ Meningkatkan tata kelola Taman Makam Pahlawan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sambas. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang kanan dilaksanakan oleh instansi/organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kegiatan adalah bagian dari program yang merupakan bentuk tindakan/aktivitas untuk mencapai *output* yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan wujud pelaksanaan dari sebuah program. Sedangkan subkegiatan merupakan penjabaran lebih rinci dari sebuah kegiatan. Ini adalah level yang paling operasional dan konkret, yang menggambarkan tindakan spesifik apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah kegiatan.

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Pemutakhiran terakhir dilakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-59889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program pemenuhan layanan Dinas Sosial Kabupaten Sambas diselaraskan dengan indikasi program serta pagu indikatif program prioritas RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah sejak mulai tahun 2025 sampai dengan 2030. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Program Dinas Sosial Kabupaten Sambas

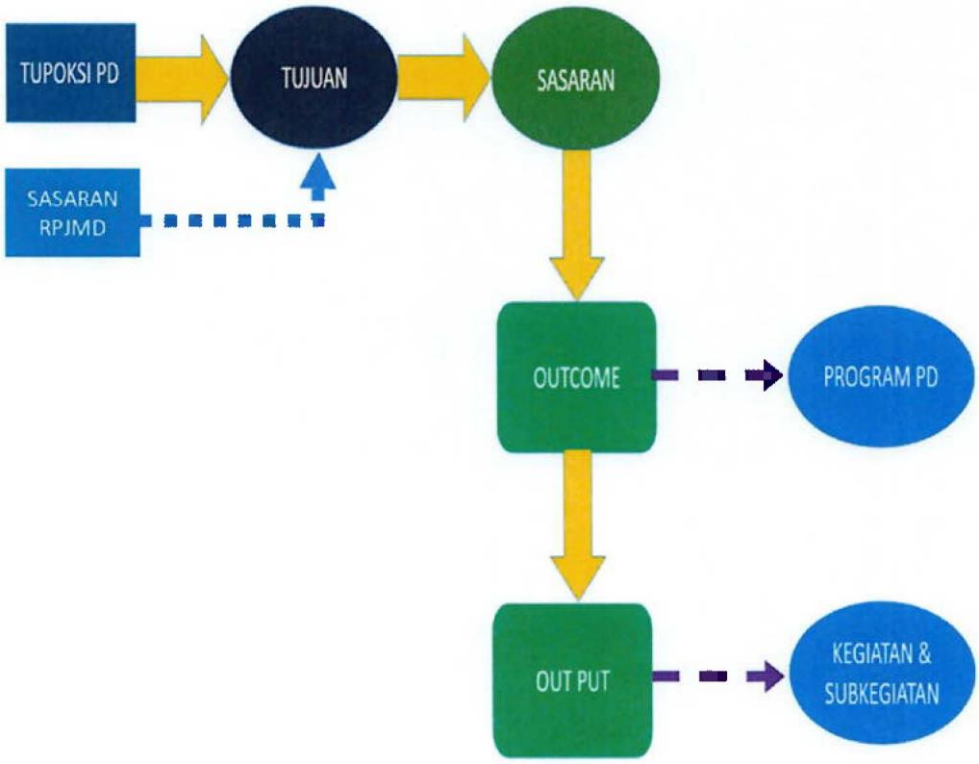
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.254.184.262,26		7.817.730.327,83		10.163.049.426,17		11.687.506.840,10		13.791.258.071,30	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.376.358.846,62		2.970.448.558,28		3.861.583.125,75		4.440.820.594,62		5.240.168.301,64	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.376.358.846,62	100	2.970.448.558,28	100	3.861.583.125,75	100	4.440.820.594,62	100	5.240.168.301,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					425.000.000,00		531.250.000,00		664.062.500,00		830.078.125,00		1.037.597.656,25	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	11.11	11.11	22.22	425.000.000,00	33.33	531.250.000,00	44.44	664.062.500,00	55.56	830.078.125,00	66.67	1.037.597.656,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial (%)	58.66	58.66	59.81		64.59		69.38		74.16		78.95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	3	5	10	50.000.000,00	15	62.500.000,00	20	78.125.000,00	25	97.656.250,00	30	122.070.312,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.527.825.415,64		1.909.781.769,55		2.387.227.211,94		2.984.034.014,92		3.730.042.518,65	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	1.527.825.415,64	100	1.909.781.769,55	100	2.387.227.211,94	100	2.984.034.014,92	100	3.730.042.518,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.325.000.000,00		1.656.250.000,00		2.312.676.588,48		2.260.699.105,56		2.684.816.782,26	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	1.45	3.33	6.66	1.325.000.000,00	9.99	1.656.250.000,00	13.32	2.312.676.588,48	16.65	2.260.699.105,56	19.98	2.684.816.782,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.45	3.33	6.66		9.99		13.32		16.65		19.98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					300.000.000,00		375.000.000,00		468.750.000,00		585.937.500,00		732.421.875,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	375.000.000,00	100	468.750.000,00	100	585.937.500,00	100	732.421.875,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya (%)	1.03	1.54	2.05		2.56		3.08		3.59		4.10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00		244.140.625,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	312.500.000,00	100	390.625.000,00	100	488.281.250,00	100	244.140.625,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
TOTAL KESELURUHAN					6.254.184.262,26		7.817.730.327,83		10.163.049.426,17		11.687.506.840,10		13.791.258.071,30	

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan acuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output.* Kerangka perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Hasil perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS							
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial menuju Inklusif				Indeks Kesejahteraan Sosial		
		Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial			Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
					Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
				Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	
				Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Meningkatnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	
					Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	
					Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	
					Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	1.06.06.2.02.0010 - Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	
		Peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat perlindungan sosial			Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang sah dan/atau tidak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
					Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	
				Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang semakin akurat	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
					Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
				Meningkatnya cakupan layanan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sambas yaitu pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sambas mulai tahun 2025 hingga tahun 2030.

Adapun indikasi program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif tahun 2025-2030 ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.254.184.262,26		7.817.730.327,83		10.163.049.426,17		11.687.506.840,10		13.791.258.071,30	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.376.358.846,62		2.970.448.558,28		3.861.583.125,75		4.440.820.594,62		5.240.168.301,64	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	100	2.376.358.846,62	100	2.970.448.558,28	100	3.861.583.125,75	100	4.440.820.594,62	100	5.240.168.301,64	
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.250,00		39.062.400,00		48.828.000,00	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	31.250.250,00	1	39.062.400,00	1	48.828.000,00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.500,00		4.882.800,00		6.103.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.500,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.843.644.996,08		2.304.556.245,10		2.990.923.118,63		3.452.061.561,42		4.084.369.671,98	
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	1.843.644.996,08	1	2.304.556.245,10	1	2.990.923.118,63	1	3.452.061.561,42	1	4.084.369.671,98	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	16		20		26		30		36		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	24		24		24		24		24		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	1		1		1		1		1		
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.763.644.996,08		2.204.556.245,10		2.865.923.118,63		3.295.811.586,42		3.889.057.671,98	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	16	1.763.644.996,08	20	2.204.556.245,10	26	2.865.923.118,63	30	3.295.811.586,42	36	3.889.057.671,98	
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				75.000.000,00		93.750.000,00		117.187.500,00		146.484.375,00		183.105.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	24	75.000.000,00	24	93.750.000,00	24	117.187.500,00	24	146.484.375,00	24	183.105.000,00	
1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.000.000,00		6.250.000,00		7.812.500,00		9.765.600,00		12.207.000,00	
Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	5.000.000,00	4	6.250.000,00	4	7.812.500,00	4	9.765.600,00	4	12.207.000,00	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1		1		1		1		1		
1.06.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	2.500.000,00	1	3.125.000,00	1	3.906.250,00	1	4.882.800,00	1	6.103.500,00	
1.06.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00		4.882.800,00		6.103.500,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	2.500.000,00	4	3.125.000,00	4	3.906.250,00	4	4.882.800,00	4	6.103.500,00	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.000.000,00		56.250.000,00		70.312.500,00		87.890.625,00		109.863.125,00	
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2	45.000.000,00	2	56.250.000,00	3	70.312.500,00	4	87.890.625,00	5	109.863.125,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1		1		1		1		1		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	1	61.035.000,00	
1.06.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00	3	31.250.000,00	4	39.062.500,00	5	48.828.125,00	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				201.100.000,00		251.375.000,00		314.218.750,00		392.773.500,00		490.966.375,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	201.100.000,00	30	251.375.000,00	30	314.218.750,00	30	392.773.500,00	30	490.966.375,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	24		24		24		24		24		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	45		45		45		45		45		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	15		15		15		15		15		
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	10	10.000.000,00	10	12.500.000,00	10	15.625.000,00	10	19.531.250,00	10	24.414.000,00	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000,00		9.375.000,00		11.718.750,00		14.648.500,00		18.310.625,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	15	7.500.000,00	15	9.375.000,00	15	11.718.750,00	15	14.648.500,00	15	18.310.625,00	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		37.500.000,00		46.875.000,00		58.593.750,00		73.242.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	45	30.000.000,00	45	37.500.000,00	45	46.875.000,00	45	58.593.750,00	45	73.242.000,00	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		37.500.000,00		46.875.000,00		58.593.750,00		73.242.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	5	30.000.000,00	5	37.500.000,00	5	46.875.000,00	5	58.593.750,00	5	73.242.000,00	
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000,00		4.500.000,00		5.625.000,00		7.031.250,00		8.789.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	24	3.600.000,00	24	4.500.000,00	24	5.625.000,00	24	7.031.250,00	24	8.789.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		244.140.625,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	30	100.000.000,00	30	125.000.000,00	30	156.250.000,00	30	195.312.500,00	30	244.140.625,00	
1.06.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00		125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		193.242.000,00	
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	156.250.000,00	3	195.312.500,00	3	193.242.000,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1		2		3		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		0		0		2		3		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6		8		10		12		14		
1.06.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		37.500.000,00		46.875.000,00		-		-	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	30.000.000,00	2	37.500.000,00	3	46.875.000,00	0	-	0	-	
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		58.593.750,00		73.242.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	2	58.593.750,00	3	73.242.000,00	
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				35.000.000,00		43.750.000,00		54.687.500,00		68.359.375,00		60.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6	35.000.000,00	8	43.750.000,00	10	54.687.500,00	12	68.359.375,00	14	60.000.000,00	
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000,00		43.750.000,00		54.687.500,00		68.359.375,00		60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2	35.000.000,00	2	43.750.000,00	2	54.687.500,00	3	68.359.375,00	3	60.000.000,00	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.013.850,54		87.517.313,18		125.816.007,12		157.704.408,20		174.129.879,66	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	70.013.850,54	1	87.517.313,18	1	125.816.007,12	1	157.704.408,20	1	174.129.879,66	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	3		3		3		3		3		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1		1		1		1		1		
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000,00		4.500.000,00		5.625.000,00		7.031.250,00		8.789.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1	3.600.000,00	1	4.500.000,00	1	5.625.000,00	1	7.031.250,00	1	8.789.000,00	
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				46.413.850,54		58.017.313,18		88.941.007,12		111.610.658,20		116.512.754,66	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	3	46.413.850,54	3	58.017.313,18	3	88.941.007,12	3	111.610.658,20	3	116.512.754,66	
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.600.000,00		114.500.000,00		165.000.000,00		106.250.000,00		126.562.250,00	
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tetap dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	1	91.600.000,00	1	114.500.000,00	1	165.000.000,00	1	106.250.000,00	1	126.562.250,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	20		25		30		40		50		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	20		25		30		40		50		
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	1	61.035.000,00	
1.06.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.600.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.125.000,00		3.906.250,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	20	1.600.000,00	25	2.000.000,00	30	2.500.000,00	40	3.125.000,00	50	3.906.250,00	
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		18.750.000,00		23.437.500,00		29.296.875,00		36.621.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	20	15.000.000,00	25	18.750.000,00	30	23.437.500,00	40	29.296.875,00	50	36.621.000,00	
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		62.500.000,00		100.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	50.000.000,00	1	62.500.000,00	1	100.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				425.000.000,00		531.250.000,00		664.062.500,00		830.078.125,00		1.037.597.656,25	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial	58.66	59.81	425.000.000,00	64.59	531.250.000,00	69.38	664.062.500,00	74.16	830.078.125,00	78.95	1.037.597.656,25	
	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	11.11	22.22		33.33		44.44		55.56		66.67		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	1	25.000.000,00	2	31.250.000,00	3	39.062.500,00	4	48.828.125,00	5	61.035.156,25	
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	1	25.000.000,00	2	31.250.000,00	3	39.062.500,00	4	48.828.125,00	5	61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00		500.000.000,00		625.000.000,00		781.250.000,00		976.562.500,00	
Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0	50	400.000.000,00	50	500.000.000,00	50	625.000.000,00	50	781.250.000,00	50	976.562.500,00	
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10		20		30		40		50		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	7	10		15		20		25		30		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	93	6		7		8		9		10		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1		2		3		4		5		
	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	0	195		195		195		195		195		
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0	10		20		30		40		50		
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	0	80		80		80		80		80		
	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1046	600		700		800		900		1000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	25.000.000,00	20	31.250.000,00	30	39.062.500,00	40	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	1	61.035.156,25	
1.06.02.2.03.0010 - Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	7	10	25.000.000,00	15	31.250.000,00	20	39.062.500,00	25	48.828.125,00	30	61.035.156,25	
1.06.02.2.03.0011 - Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0	50	50.000.000,00	50	62.500.000,00	50	78.125.000,00	50	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	25.000.000,00	2	31.250.000,00	3	39.062.500,00	4	48.828.125,00	5	61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	0	195	50.000.000,00	195	62.500.000,00	195	78.125.000,00	195	97.656.250,00	195	122.070.312,50	
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	0	80	50.000.000,00	80	62.500.000,00	80	78.125.000,00	80	97.656.250,00	80	122.070.312,50	
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	0	10	50.000.000,00	20	62.500.000,00	30	78.125.000,00	40	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.02.2.03.0016 - Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	1046	600	50.000.000,00	700	62.500.000,00	800	78.125.000,00	900	97.656.250,00	1000	122.070.312,50	
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	93	6	50.000.000,00	7	62.500.000,00	8	78.125.000,00	9	97.656.250,00	10	122.070.312,50	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	3	10	50.000.000,00	15	62.500.000,00	20	78.125.000,00	25	97.656.250,00	30	122.070.312,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100	100		100		100		100		100		
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15	10	50.000.000,00	15	62.500.000,00	20	78.125.000,00	25	97.656.250,00	30	122.070.312,50	
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15	10	50.000.000,00	15	62.500.000,00	20	78.125.000,00	25	97.656.250,00	30	122.070.312,50	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.527.825.415,64		1.909.781.769,55		2.387.227.211,94		2.984.034.014,92		3.730.042.518,65	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	1.527.825.415,64	100	1.909.781.769,55	100	2.387.227.211,94	100	2.984.034.014,92	100	3.730.042.518,65	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				927.825.415,64		1.159.781.769,55		1.449.727.211,94		1.812.159.014,92		2.265.198.768,65	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0	5	927.825.415,64	6	1.159.781.769,55	8	1.449.727.211,94	10	1.812.159.014,92	12	2.265.198.768,65	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	30		35		40		45		50		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30		35		45		60		75		
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10		15		20		25		30		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	21	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	14	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21	12		14		16		18		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	162	200		250		300		350		400		
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	8	100		125		150		175		200		
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	6		7		8		9		10		
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22	30		35		40		45		50		
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				100.000.000,00		125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		244.140.625,00	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	162	200	100.000.000,00	250	125.000.000,00	300	156.250.000,00	350	195.312.500,00	400	244.140.625,00	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	8	100	50.000.000,00	125	62.500.000,00	150	78.125.000,00	175	97.656.250,00	200	122.070.312,50	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				152.825.415,64		191.031.769,55		238.789.711,94		298.487.139,92		373.108.924,90	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30	152.825.415,64	35	191.031.769,55	45	238.789.711,94	60	298.487.139,92	75	373.108.924,90	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21	12	25.000.000,00	14	31.250.000,00	16	39.062.500,00	18	48.828.125,00	20	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	22	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	21	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	14	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				200.000.000,00		250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	30	200.000.000,00	35	250.000.000,00	40	312.500.000,00	45	390.625.000,00	50	488.281.250,00	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	6	25.000.000,00	7	31.250.000,00	8	39.062.500,00	9	48.828.125,00	10	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0	5	25.000.000,00	6	31.250.000,00	8	39.062.500,00	10	48.828.125,00	12	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0016 - Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10	25.000.000,00	15	31.250.000,00	20	39.062.500,00	25	48.828.125,00	30	61.035.156,25	
1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.04.2.01.0018 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	0	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				600.000.000,00		750.000.000,00		937.500.000,00		1.171.875.000,00		1.464.843.750,00	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	600.000.000,00	7	750.000.000,00	8	937.500.000,00	9	1.171.875.000,00	10	1.464.843.750,00	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20		25		30		40		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0	40		50		60		70		80		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	26665	30500		31000		31500		32000		32500		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30		35		40		45		50		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1		
1.06.04.2.02.0001 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0002 - Pemberian Layanan Kedaruratan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0005 - Penyediaan Alat Bantu				100.000.000,00		125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		244.140.625,00	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	20	100.000.000,00	25	125.000.000,00	30	156.250.000,00	40	195.312.500,00	50	244.140.625,00	
1.06.04.2.02.0006 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.04.2.02.0009 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	0	6	25.000.000,00	7	31.250.000,00	8	39.062.500,00	9	48.828.125,00	10	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	26665	30500	50.000.000,00	31000	62.500.000,00	31500	78.125.000,00	32000	97.656.250,00	32500	122.070.312,50	
1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000,00	35	31.250.000,00	40	39.062.500,00	45	48.828.125,00	50	61.035.156,25	
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	1	61.035.156,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.04.2.02.0015 - Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.04.2.02.0016 - Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	0	40	50.000.000,00	50	62.500.000,00	60	78.125.000,00	70	97.656.250,00	80	122.070.312,50	
1.06.04.2.02.0017 - Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	0	30	50.000.000,00	35	62.500.000,00	40	78.125.000,00	45	97.656.250,00	50	122.070.312,50	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.325.000.000,00		1.656.250.000,00		2.312.676.588,48		2.260.699.105,56		2.684.816.782,26	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100	100	1.325.000.000,00	100	1.656.250.000,00	100	2.312.676.588,48	100	2.260.699.105,56	100	2.684.816.782,26	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	1.45	6.66		9.99		13.32		16.65		19.98		
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1.45	6.66		9.99		13.32		16.65		19.98		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				40.000.000,00		50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00	
Terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau wali yang sah dan/atau tidak mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	40.000.000,00	2	50.000.000,00	3	62.500.000,00	4	78.125.000,00	5	97.656.250,00	
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1		2		3		4		5		
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	10.000.000,00	2	12.500.000,00	3	15.625.000,00	4	19.531.250,00	5	24.414.062,50	
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	10.000.000,00	2	12.500.000,00	3	15.625.000,00	4	19.531.250,00	5	24.414.062,50	
1.06.05.2.01.0004 - Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.285.000.000,00		1.606.250.000,00		2.250.176.588,48		2.182.574.105,56		2.587.160.532,26	
Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang semakin akurat	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	500	1.285.000.000,00	625	1.606.250.000,00	780	2.250.176.588,48	975	2.182.574.105,56	1200	2.587.160.532,26	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	224430	224430		224430		224430		224430		224430		
	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	0	40		50		80		40		40		
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50		75		100		125		150		
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	53557	51965		51965		51965		51965		51965		
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200	1200		1200		1200		1200		1200		
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00		610.351.562,50	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	224430	224430	250.000.000,00	224430	312.500.000,00	224430	390.625.000,00	224430	488.281.250,00	224430	610.351.562,50	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				150.000.000,00		187.500.000,00		234.375.000,00		292.968.750,00		366.210.937,50	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50	150.000.000,00	75	187.500.000,00	100	234.375.000,00	125	292.968.750,00	150	366.210.937,50	
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00		610.351.562,50	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	53557	51965	250.000.000,00	51965	312.500.000,00	51965	390.625.000,00	51965	488.281.250,00	51965	610.351.562,50	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		244.140.625,00	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200	1200	100.000.000,00	1200	125.000.000,00	1200	156.250.000,00	1200	195.312.500,00	1200	244.140.625,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				125.000.000,00		156.250.000,00		195.312.500,00		244.140.625,00		305.175.781,25	
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	500	125.000.000,00	625	156.250.000,00	780	195.312.500,00	975	244.140.625,00	1200	305.175.781,25	
1.06.05.2.02.0010 - Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota				410.000.000,00		512.500.000,00		882.989.088,48		473.589.730,56		450.930.063,51	
Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	0	40	410.000.000,00	50	512.500.000,00	80	882.989.088,48	40	473.589.730,56	40	450.930.063,51	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				300.000.000,00		375.000.000,00		468.750.000,00		585.937.500,00		732.421.875,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	300.000.000,00	100	375.000.000,00	100	468.750.000,00	100	585.937.500,00	100	732.421.875,00	
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	1.03	2.05		2.56		3.08		3.59		4.10		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				105.000.000,00		131.250.000,00		164.062.500,00		205.078.125,00		256.347.656,25	
Terlaksananya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	19125	100	105.000.000,00	150	131.250.000,00	200	164.062.500,00	250	205.078.125,00	300	256.347.656,25	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	16	20		25		30		40		50		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	87	15		20		25		30		35		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10		15		20		25		30		
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	43	60		70		80		90		100		
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				45.000.000,00		56.250.000,00		70.312.500,00		87.890.625,00		109.863.281,25	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	19125	100	45.000.000,00	150	56.250.000,00	200	70.312.500,00	250	87.890.625,00	300	109.863.281,25	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000,00		18.750.000,00		23.437.500,00		29.296.875,00		36.621.093,75	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	87	15	15.000.000,00	20	18.750.000,00	25	23.437.500,00	30	29.296.875,00	35	36.621.093,75	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	10	10.000.000,00	15	12.500.000,00	20	15.625.000,00	25	19.531.250,00	30	24.414.062,50	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	16	20	20.000.000,00	25	25.000.000,00	30	31.250.000,00	40	39.062.500,00	50	48.828.125,00	
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				15.000.000,00		18.750.000,00		23.437.500,00		29.296.875,00		36.621.093,75	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	43	60	15.000.000,00	70	18.750.000,00	80	23.437.500,00	90	29.296.875,00	100	36.621.093,75	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				195.000.000,00		243.750.000,00		304.687.500,00		380.859.375,00		476.074.218,75	
Meningkatnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0	40	195.000.000,00	50	243.750.000,00	60	304.687.500,00	70	380.859.375,00	80	476.074.218,75	
	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	5		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	49		49		49		49		49		
	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	0	40		50		60		70		80		
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	49		49		49		49		49		
	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	0	5		10		15		20		25		
	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	0	1		1		1		1		1		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24	49	50.000.000,00	49	62.500.000,00	49	78.125.000,00	49	97.656.250,00	49	122.070.312,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.06.2.02.0004 - Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0	5	10.000.000,00	5	12.500.000,00	5	15.625.000,00	5	19.531.250,00	5	24.414.062,50	
1.06.06.2.02.0005 - Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	
1.06.06.2.02.0006 - Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana				40.000.000,00		50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00	
Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0	49	40.000.000,00	49	50.000.000,00	49	62.500.000,00	49	78.125.000,00	49	97.656.250,00	
1.06.06.2.02.0007 - Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana				20.000.000,00		25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00	
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	0	5	20.000.000,00	10	25.000.000,00	15	31.250.000,00	20	39.062.500,00	25	48.828.125,00	
1.06.06.2.02.0008 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0	40	10.000.000,00	50	12.500.000,00	60	15.625.000,00	70	19.531.250,00	80	24.414.062,50	
1.06.06.2.02.0009 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	
1.06.06.2.02.0010 - Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial				10.000.000,00		12.500.000,00		15.625.000,00		19.531.250,00		24.414.062,50	
Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	0	1	10.000.000,00	1	12.500.000,00	1	15.625.000,00	1	19.531.250,00	1	24.414.062,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.06.06.2.02.0011 - Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	0	40	25.000.000,00	50	31.250.000,00	60	39.062.500,00	70	48.828.125,00	80	61.035.156,25	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00		244.140.625,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	250.000.000,00	100	312.500.000,00	100	390.625.000,00	100	488.281.250,00	100	244.140.625,00	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				250.000.000,00		312.500.000,00		390.625.000,00		488.281.250,00		244.140.625,00	
Meningkatnya cakupan layanan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	250.000.000,00	1	312.500.000,00	1	390.625.000,00	1	488.281.250,00	1	244.140.625,00	
	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	1000		1000		1000		1000		1000		
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	1		1		1		1		0		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1		1		1		1		1		
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000,00		187.500.000,00		234.375.000,00		292.968.750,00		-	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	1	150.000.000,00	1	187.500.000,00	1	234.375.000,00	1	292.968.750,00	0	-	
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50.000.000,00		62.500.000,00		78.125.000,00		97.656.250,00		122.070.312,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	50.000.000,00	1	62.500.000,00	1	78.125.000,00	1	97.656.250,00	1	122.070.312,50	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	25.000.000,00	1	31.250.000,00	1	39.062.500,00	1	48.828.125,00	1	61.035.156,25	
1.06.07.2.01.0005 - Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.000.000,00		31.250.000,00		39.062.500,00		48.828.125,00		61.035.156,25	
Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	1000	25.000.000,00	1000	31.250.000,00	1000	39.062.500,00	1000	48.828.125,00	1000	61.035.156,25	

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan Program Strategis Nasional (ProSN), yang ditetapkan Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Arah kebijakan bidang urusan sosial dalam mendukung Asta Cita yaitu **Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi**. Arah kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi 2 (dua) dari 8 (delapan) Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 yaitu :

- Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Asta Cita 7 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas..

Daftar subkegiatan prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas sebagaimana pada Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan lndikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core area/bussiness* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Sambas ditetapkan sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	56,88	57,38	57,88	58,38	58,88	59,38	
2.	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks	96,1	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	200	690	1.380	2.070	2.760	3.450	4.140	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan. IKK membantu mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK juga merupakan alat ukur untuk mengkomunikasikan hasil kerja, menggambarkan kondisi yang ingin dipertanggungjawabkan, serta menjadi dasar untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKK) sebagaimana pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Sosial Kabupaten Sambas

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan		%	3	5	10	15	20	25	30	
2.	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	kebutuhan dasarnya										
6.	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial		%	11.11	11.11	22.22	33.33	44.44	55.56	66.67	
7.	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		Keluarga	1.45	3.33	6.66	9.99	13.32	16.65	19.98	
8.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		Persentase	1.45	3.33	6.66	9.99	13.32	16.65	19.98	
9.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang		%	58.66	58.66	59.81	64.59	69.38	74.16	78.95	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial										
12.	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sambas. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana langkah strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam upaya mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi strategis Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan di bidang sosial dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Sosial Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial Kabupaten Sambas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun menjadi Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian

kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sambas ini.